

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik masyarakat menjadi persoalan serius di Indonesia. Menurut catatan sejarah dalam dasawarsa tahun 2001 telah terjadi konflik dasyat antara masyarakat Etnis dayak dan Madura di Kalimantan. Dalam waktu yang boleh dikatakan singkat, konflik menyebar menjadi kekerasan dengan begitu cepat. Bahkan korban jiwa tercatat sampai 600 orang. Peristiwa-peristiwa pembakaran rumah Dayak, pembunuhan warga Dayak oleh orang Madura dan pemenggalan kepala 100 orang Madura oleh orang Dayak telah berlangsung tragis. Aksi saling menyerang tidak dapat dihindarkan oleh kedua kelompok sehingga menyebabkan banyak kerugian, baik kerugian fisik, psikis dan lainnya. Menurut Amri Marzali, pada masa awal kemerdekaan Indonesia konflik etnis tidak seserius seperti apa yang terjadi dewasa ini, khususnya setelah kejatuhan Soeharto pada tahun 1998” (Asy’ari, 2001: 15).

Kelompok masyarakat yang merupakan bagian penting dari keberadaan suatu negara sering digambarkan sebagai suatu kesatuan yang mempunyai ideologi yang sama, kehidupan yang saling bergantung satu sama lain, tidak luput pula terjadi masalah di dalamnya. Penulis setuju dengan pendapat Nasikun yang mengatakan bahwa konflik pada hakikatnya merupakan suatu gejala sosial yang melekat di dalam kehidupan setiap masyarakat, dan juga melekat di dalam kehidupan setiap bangsa.

Menurutnya setiap konflik sosial dalam berbagai kehidupan masyarakat memiliki polanya masing-masing karena setiap konflik memiliki sumber yang menyebabkannya beragam dan tidak sama ((Nasikun,2011: 5). Diantara kasus-kasus perpecahan yang terjadi di Indonesia seperti konflik Agama, konflik politik dan konflik nasional, ternyata konflik antara kelompok masyarakat cukup rentan terjadi. Mengingat masyarakat Indonesia terdiri dari bersuku-suku dan hidup berkelompok dari sabang sampai merauke dan telah memiliki struktur kehidupan masyarakatnya sendiri-sendiri maka konflik perpecahan antara kelompok sudah sewajarnya merupakan gejala yang umum terjadi. Seperti yang telah di singgung di atas, konflik masyarakat Madura dan Sampit yang tidak bisa diredam dan bersifat ekstrim, maka tidak menutup kemungkinan konflik-konflik seperti itu yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Namun, dari serangkaian peristiwa konflik, perlu membahas konflik dalam ruang lingkup yang luas dimana mencakup bentuknya, tahapannya, dan bentuk penyelesaiannya. Dalam lingkup yang lebih terinci, penulis juga tertarik pada bentuk upaya penyelesaian yang telah dilakukan dan apakah sudah berhasil dilakukan atau belum dalam menyelesaikan suatu konflik.

Berangkat dari hal itu, maka penulis di sini akan membahas mengenai upaya-upaya penyelesaian konflik pada masyarakat di Sumatera Barat yaitu antara masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai guna mengetahui sejauh mana upaya penyelesaian dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis bermaksud menggunakan pendekatan resolusi konflik, dimana pendekatan tersebut adalah salah

satu pendekatan yang digunakan dalam mengelola konflik. Menurut hemat penulis, masalah yang dihadapi kedua kelompok masyarakat tersebut, sebenarnya merupakan dampak dari ketidaksepahaman masyarakat terhadap kepemilikan seluasannya tanah yang membentang antara kedua wilayah *nagari*. Ketidaksepahaman tersebut menggiring masyarakat untuk saling klaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Bagi masyarakat Saniang baka, tanah tersebut merupakan kepemilikan dari suku Koto (nama salah satu suku di Saniang Baka) dan di sisi lain, masyarakat Muaro Pingai mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah *nagari* mereka dengan berpedoman pada peta Belanda. Perdebatan antara keduanya menjadi semakin tidak terarah dikarenakan sosialisasi yang tidak lancar dan sikap dari pemerintah yang seolah apatis terhadap penyelesaiannya, sehingga pada akhir tahun 2003 konflik berujung pada kekerasan.

Dalam peraturan pemerintahan Indonesia masalah pertanahan dibahas menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Jika di jelaskan lebih jauh kata “agraria” berasal dari bahasa “akker” (bahasa Belanda) dan “agros” (bahasa Yunani) yang berarti tanah pertanian, “agger” (bahasa latin) yang berarti tanah atau sebidang tanah, dan “agrarian” (bahasa Inggris) yang berarti tanah untuk pertanian. Dijelaskan juga oleh Boedi Harsono dalam Bukunya yang berjudul Hukum Agraria Indonesia, menyatakan bahwa hukum agraria bukan hanya merupakan suatu perangkat bidang hukum, melainkan terdiri dari berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur mengenai hak-hak penguasaan terhadap sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk pengertian agraria yaitu hukum tanah

yang didalamnya mengatur hak-hak penguasaan atas tanah, dalam arti permukaan bumi. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai tanah kadang digunakan kata agraria karena antara keduanya memang cukup dekat dan berhubungan.

Terkait persoalan agraria, menurut Christodoulou seperti yang dikutip oleh Afrizal (2006: 6), di berbagai tempat di dunia, konflik agraria cenderung diabaikan dan pengabaian konflik itu telah menyebabkan konflik agraria yang tidak diselesaikan dengan baik menimbulkan dampak ekonomi, politis dan sosial terhadap suatu masyarakat disebabkan oleh konflik-konflik semacam itu sering menjadi dasar ketidakstabilan politik dan pergolakan sosial. Disambung oleh Afrizal, bahwa mengingat konflik tersebut terus terjadi, sudah saatnya perhatian serius diberikan oleh berbagai kalangan termasuk akademisi. Perhatian harus diberikan pada konflik agraria dengan menganalisis penyebabnya dan memetakan aktor - aktor yang terlibat guna mencari cara untuk memecahkannya atau mengurangi besaran dan intensitas kejadiannya dan menelaah solusi- solusi untuk memecahkan konflik semacam itu.

Konflik masyarakat Saniang Baka dan Muaro Pingai sudah seharusnya menjadi pelajaran penting bagi semua pihak termasuk pemerintah dan masyarakat. Meskipun konflik masyarakat ini intensitasnya tidak sebesar konflik Sampit dan Poso, tapi dampak yang ditimbulkannya cukup besar di berbagai bidang seperti dalam bidang sosial dan ekonomi. Hubungan masyarakat yang buruk dan munculnya sentimen masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan. Di bidang ekonomi masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani dan peladang juga sangat terganggu dikarenakan lahan yang tengah

disengketakan juga merupakan tempat mereka untuk mencari nafkah.

Dalam kondisi demikian, masyarakat beserta perangkat *nagari* pada masa itu juga turut berupaya melakukan berbagai usaha penyelesaian. Dimulai dari diadakan musyawarah di tingkat *nagari* dengan cara negosiasi mengenai batas tanah. Namun dalam kenyataannya proses penyelesaian tersebut tidak berjalan lancar sehingga perlu bantuan dari pihak ketiga sebagai mediator. Dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator sekaligus yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan konflik adalah pemerintah Kabupaten Solok. Namun, menurut hasil wawancara penulis dengan masyarakat, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidak maksimal. Justru pemerintah dinilai seolah lepas tangan terhadap konflik ini. Padahal dengan adanya kekuasaan dan kekuatan hukum yang dimiliki oleh pemerintah seharusnya pemerintah bisa memberi jalan penyelesaian yang bijak dan tegas.

Mengingat konflik pertanahan ini juga sudah berlangsung cukup lama dan pemerintah pun sudah mengetahui sejarahnya, idealnya konflik ini bisa diselesaikan dengan jalan damai tanpa kekerasan. Namun, saat jalan damai ditawarkan oleh pihak pemerintah, maka sudah cukup bagi masyarakat mendapatkan pembelajaran dari konflik yang terjadi dan menerima keputusan tersebut sebagai suatu pengalaman berharga. Bukankah konflik tanpa kekerasan lebih memungkinkan setelahnya masyarakat akan menjalin hubungan yang erat.

B. Rumusan Masalah

Terdapat berbagai istilah yang merujuk pada bentuk-bentuk konflik, baik itu konflik horizontal yang sering digambarkan dengan konflik antara kelompok,

maupun bentuk-bentuk lainnya dari konflik seperti konflik etnis atau agama yang lebih luas cakupannya. Namun persoalan yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana cara konflik itu dipelajari, bahkan dari sekian rentetan kisah yang terjadi penulis bermaksud ingin menggali data yang akurat agar konflik bisa dipelajari dari berbagai sudut pandang. Terkhusus pada penelitian ini penulis akan melihat menggunakan sudut pandang bagaimana bentuk penyelesaian yang telah diupayakan.

Singkatnya, konflik antara masyarakat di atas telah melalui berbagai upaya penyelesaian. Upaya yang dilakukan dengan jalan musyawarah, telah melibatkan berbagai jajaran masyarakat seperti : *urang ampek jinih*, *tungku tigo sajarangan* dan Lembaga KAN (Kerapatan Adat *nagari*). Ketika dengan musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka upaya yang juga dilakukan adalah dengan jalan mediasi oleh pihak ketiga baik oleh Masyarakat *nagari* Paninggahan sebagai *nagari* tetangga dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagai pihak yang memiliki kekuasaan.

Namun, sayangnya setelah sekian banyak upaya dilakukan tidak kunjung menemui jalan perdamaian. Konflik terus berlangsung di tahun 2003 sampai 2008 yang bahkan menyebabkan banyak kerugian baik fisik maupun nonfisik. Sepanjang tahun tersebut setiap upaya penyelesaian yang dilakukan tidak kunjung menemui hasil yang bisa menengahi perselisihan, sehingga masyarakat seakan menyimpan api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar. Oleh karena diperlukan upaya untuk mengelola konflik agar upaya penyelesaian konflik bisa mencapai tujuannya. Namun, jika berbicara mengelola konflik, tujuannya tidak

akan sampai pada penyelesaian konflik saja. Fisher et. al, mengatakan bahwa maksud dari resolusi konflik adalah untuk membangun hubungan yang bertahan lama pada masyarakat yang berkonflik selain dari pengupayaan penyelesaiannya.

Proses belajar mengenai pemahaman untuk mengelola konflik sebagaimana maksud penulis dalam penelitian ini adalah suatu kebutuhan yang lebih berguna dalam memahami konflik. Melihat seberapa efektif sebuah proses resolusi bekerja, dan atau dalam usahanya kendala apa saja yang ditemui, namun tak terbatas sampai disitu karena fakta lain mungkin terjadi dilapangan terlepas dari apa yang penulis sebutkan disini. Konflik bisa saja diusahakan penyelesaiannya, namun dalam upaya-upaya tersebut apakah langkahnya sudah tepat sehingga bisa menyelesaikan konflik masyarakat itu sendiri penulis merasa perlu dikaji dalam penelitian ini. Sebab tidak selalu konsep-konsep ideal resolusi konflik akan cocok dengan fakta empiris, dan bukankah konflik terjadi dalam sepanjang hidup manusia dan kerap bersifat kreatif sehingga tidak bisa dinalar.

Dalam upaya memahami dan mempelajarinya peneliti bermaksud ingin merumuskan beberapa pokok masalah yang penulis rasa cukup tepat dan relevan untuk menjawab pokok-pokok persoalan di atas. Adapun rumusan masalah yang ingin penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Apa objek yang dikonflikkan oleh masyarakat *nagari* Saniang Baka dan Muaro Pingai ?
2. Bagaimana tahapan-tahapan konflik yang dilalui dan bagaimana cara meneggunakan alat bantu analisis konflik?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap upaya penyelesaian yang

diupayakan pemerintah dan bagaimanakah hubungannya dengan konflik yang hingga sekarang belum berakhir?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui objek yang dikonflikkan oleh masyarakat *nagari* Saniang Baka dan Muaro Pingai.
2. Mengetahui tahapan konflik yaitu dengan melihat serangkaian kronologis gejala-gejala yang ditimbulkan dari konflik dan upaya yang telah ditempuh oleh berbagai pihak terlibat lalu menganalisisnya menggunakan alat bantu analisis.
3. Mengetahui perspektif masyarakat terhadap upaya penyelesaian konflik dari pemerintah dan sekaligus mengetahui faktor penyebab kenapa konflik tidak menemui akhir penyelesaian meskipun telah dilakukan upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu sosial. Hubungan manusia dalam masyarakat memang sudah banyak dilakukan oleh para ahli sosial, namun konflik sosial selalu terjadi dan perlu dibahas sebagai bahan pembelajaran bagi semua kalangan termasuk para ahli sosial, akademisi, pemerintah dan masyarakat.
2. Memberikan gambaran kepada pemerintah dan masyarakat bahwa perlunya kerjasama dan kesungguhan dalam menyelesaikan konflik. Takutnya, konflik jika terlalu lama di diamkan ibarat “memendam api dalam sekam”.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi kepustakaan ada beberapa tulisan yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain:

Fisher et.al, (2001) dalam bukunya yang berjudul *Mengelola Konflik : Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, menuntun penulis untuk memahami konflik dengan menawarkan berbagai ide, metode dan teknik yang dikembangkan dari para praktisi dan masyarakat yang memiliki pengalaman langsung dalam berbagai situasi konflik. Menurutnya, terdapat beberapa ide dasar dalam memikirkan konflik yaitu dengan cara memahami konflik, menangani konflik, menentukan pendekatan untuk mengelola konflik dan memperkenalkan teori-teori mengenai penyebab konflik.

Dalam memahami konflik kita sebagai individu dituntun untuk menyadari adanya perspektif atau pandangan yang berbeda terhadap suatu hal. Hal tersebut bisa disebabkan karena perbedaan latar belakang yang menjadikan seseorang melihat sesuatu dengan cara yang berbeda. Contohnya, masing-masing individu dilahirkan dalam suatu cara hidup tertentu dan terbentuklah karakternya sebagaimana nilai-nilai yang diterimanya. Cara individu tersebut memandang dunia akan berbeda dengan individu lainnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bertemu dan bekerja dengan orang lain, seseorang akan mengalami bahwa pandangan mereka tentang suatu hal kadang berbeda. Hal diatas disebut oleh Fisher et.al, sebagai perbedaan “alami”.

Namun selain perbedaan “alami” itu ada perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh berbagai dimensi seperti : status, kekuasaan, kekayaan, usia,

peran menurut gender, keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu, dan sebagainya. Dalam situasi yang sama indikator-indikator posisi itu dalam masyarakat sering menentukan keinginan kelompok yang berbeda. Maka ketika sasaran dan kepentingan mereka bertentangan atau tidak sesuai maka konflik akan terjadi.

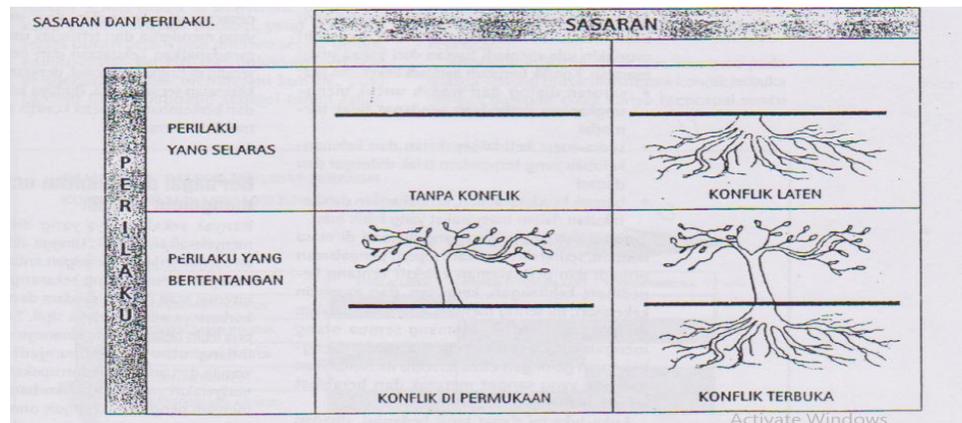
Kemudian Fisher et.al, juga mengemukakan asumsi bahwa dalam memahami konflik juga perlu digarisbawahi bahwa antara konflik dan kekerasan adalah dua konsep yang berbeda. Menurutnya konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sementara kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Menurut Fisher et.al, konflik sebagai suatu kenyataan hidup seringkali bersifat kreatif, tidak dapat dihindarkan, dan berbagai persoalan perbedaan pendapat dan konflik biasanya diselesaikan tanpa kekerasan, dan sering menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena itu, konflik tetap berguna dan memang konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia.

Kemudian konflik memanglah suatu hal yang harus ditangani. Dalam hal menangani konflik, Fisher et.al, menyebutnya dengan istilah mengintensifkan konflik. Maksud dari kata mengintensifkan konflik itu adalah mengungkap konflik laten kepermukaan dan menjadikannya terbuka. Oleh karena konflik

merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki sasaran berbeda, maka konflik dibedakan menjadi dua sumbu yaitu sasaran dan perilaku. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat gambar dibawah ini.

Gambar 1. Sasaran dan Perilaku



Sumber : Buku Mengelola Konflik Keterampilan & Strategi untuk Bertindak

Keempat bagian diatas menggambarkan kaitan antara sasaran dan perilaku yang berimplikasi pada konflik yang bertujuan untuk membedakan tipe-tipe konflik. Pada bagian pertama ketika seseorang / suatu kelompok hidup dalam keadaan tanpa konflik, berarti hal itu terkesan baik, namun untuk mempertahankan posisi seperti itu masyarakat harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif. Pada bagian kedua yaitu konflik laten, menjelaskan bahwa keadaan konflik yang bersifat tersembunyi jadi harus perlu diangkat agar bisa dikelola atau ditangani. Di bagian ketiga, konflik dipermukaan bermaksud cenderung memiliki akar yang dangkal/tanpa akar, dapat muncul hanya karena kesalahpahaman sasaran, dan dapat diatasi dengan meningkatkan atau memperbaiki komunikasi pihak terkait. Dan bagian yang terakhir, yaitu konflik terbuka yang menggambarkan bahwa konflik berakar dalam dan nyata. Sehingga diperlukan

tindakan serius untuk mengatasi akar penyebabnya dan berbagai efeknya.

Lalu dalam upaya menangani konflik, menekan konflik adalah salah satu cara untuk menimbulkan masalah baru dikemudian hari, tapi konflik itu sendiri juga bisa menjadi bagian dari solusi suatu masalah. Adapun hal yang bisa membuat konflik berubah menjadi tindakan kekerasan jika saja : pertama, tidak ditunjang oleh saluran dialog atau wadah dalam upaya mengungkapkan pendapatnya. Kedua, masih terdapatnya keluhan-keluhan dan suara-suara ketidaksepatan yang masih terpendam dan belum diatasi. Ketiga, adanya ketidakadilan, ketidakstabilan dan ketakutan dalam masyarakat. Trauma dan kepedihan dimasa lalu adalah contohnya sering menjadi penghalang dalam menangani konflik. Tanpa disadari luka-luka yang dibiarkan saja itu akan menghalangi kreatifitas kita untuk berpikir sehat bahwa perlunya menjalin hubungan baik. Selain kesusahan dalam berpikir positif, luka-luka dimasa lalu juga akan mendorong kita untuk memikirkan aksi balas dendam. Jika konflik selalu ditangani dengan kekerasan, maka secara sadar maupun tidak akan membentuk budaya kekerasan dalam setiap penyelesaiannya.

Untuk itu, diperlukan berbagai pendekatan dalam mengelola konflik. Pendekatan yang dimaksud sering dipandang sebagai tahap-tahap penyelesaian konflik yang mencakup tindakan-tindakan pencegahan konflik. Adapun tahapan-tahapan itu adalah :

- 1) Pencegahan Konflik, yang merupakan strategi-strategi untuk mengatasi konflik laten dengan harapan dapat mencegah meningkatnya kekerasan.
- 2) Penyelesaian Konflik, pada tahap ini mengacu pada strategi untuk

menyelesaikan konflik dipermukaan dan konflik terbuka dengan harapan mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan.

- 3) Pengelolaan Konflik, yaitu suatu strategi untuk membatasi dan menghindari kekerasan meskipun konflik masih bersifat laten dan dipermukaan dengan harapan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak yang terlibat.
- 4) Resolusi Konflik, yaitu strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya.
- 5) Transformasi Konflik, yaitu strategi yang menyeluruh dan luas, membutuhkan komitmen yang paling lama dan luas cakupannya.

Adapun cara yang bisa dilakukan dalam mengelola konflik, Fisher et.al, memberikan 6 teori yang dipandang sebagai penyebab konflik. Keenam teori tersebut yaitu :

1. Teori Hubungan Masyarakat, yang menitikberatkan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, rasa ketidakpercayaan dan permusuhan. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini adalah supaya dapat meningkatkan komunikasi antara pihak terkait dan bisa mengusahakan toleransi diantaranya.
2. Teori Negosiasi Prinsip, yaitu menilai konflik disebabkan oleh posisi yang tidak sama dan perbedaan pandangan. Adapun sasaran yang ingin dicapai melalui teori ini adalah membantu pihak untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah dan isu, lalu dapat melancarkan proses pencapaian

kesepakatan.

3. Teori Kebutuhan Manusia, memandang konflik disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia seperti fisik, mental dan sosial. Sasarannya adalah membantu individu mengidentifikasi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi dan untuk mencapai kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
4. Teori Identitas, menganggap konflik disebabkan oleh identitas yang terancam. Sasaran yang ingin dicapai dari teori ini adalah mampu memfasilitasi lokakarya dan dialog, dan mencapai kesepakatan dengan mengakui kebutuhan identitas.
5. Teori Kesalahpahaman Antarbudaya, memandang bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan cara-cara komunikasi di antara budaya yang berbeda. Sasarannya yaitu menambah pengetahuan mengenai budaya luar, mengurangi stereotif negatif tentang budaya lain, serta meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.
6. Teori Transformasi Konflik, yaitu konflik disebabkan oleh masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang memunculkan masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai dengan teori ini adalah mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan seperti : kesenjangan ekonomi. Lalu sasaran kedua adalah meningkatkan jalinan hubungan semua pihak, dan sasaran yang terakhir adalah mengembangkan proses dan sistem untuk promosi pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Kesatuan tahapan dan teori-teori diatas telah dirangkum oleh Fisher dk dengan tujuan diantaranya dapat membahas konflik yang tengah terjadi di seluruh penjuru dunia dalam upaya mengelola konflik. Lalu apakah ada teori yang relevan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mengelola suatu konflik. Jika ada, bukankah itu akan mempermudah kita dalam memahami konflik-konflik yang terjadi.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Muhammad Isa Yusaputra (2014) dalam jurnalnya yang berjudul Resolusi Konflik Masyarakat Kelurahan Baiya dan Kelurahan Lambara. Ia melakukan penelitian di dua kelurahan yang berada di Kota Palu. Dalam jurnal penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa meskipun konflik antara masyarakat Kelurahan Baiya dan Lambara tidak sebesar skala konflik Poso, namun dia menekankan bahwa sudah menjadi bagi seluruh masyarakat untuk bisa mencari jalan damai bagi ketentraman bersama mengingat rentannya konflik antara kelompok terjadi. Resolusi konflik yang ditempuh untuk meredam konflik kedua masyarakat tersebut ia petakan menggunakan teori Boundling dimana ada 3 hal dibahas olehnya, pertama adanya asumsi bahwa menghindari konflik adalah menawarkan sebuah kemungkinan pilihan sebagai jawaban terbaik. Dalam upaya penyelesaian konflik masyarakat Lambara dengan Baiya, pemerintah kota Palu menawarkan pilihan damai kepada tokoh masyarakat dan aparat desa. Para tokoh masyarakat tersebut berperan sebagai koordinator lapangan dalam mewujudkan perdamaian di kedua kelurahan.

Pokok kedua yang dibahasnya adalah menaklukkan atau mengeliminasi konflik dengan penegakkan hukum. Hal tersebut diikat oleh perjanjian antara

pemerintah dengan kedua masyarakat kelurahan tersebut, dimana jika konflik kembali terjadi maka penyelesaian akan dilakukan menurut prosedur hukum yang berlaku. Pokok ketiga dalam bahasannya adalah mengakhiri konflik melalui prosedur rekonsiliasi atau kompromi dalam kesepakatan jika terjadi konflik. Menurutnya, penyelesaian konflik kedua masyarakat tersebut sangat memerlukan solusi yang bersifat permanen agar konflik bisa diakhiri.

Kemudian ia mencoba menganalisis konflik jika dilihat sebagai perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Berdasarkan hasil penelitiannya, ia mendapati beberapa faktor pendukung munculnya konflik antara kedua masyarakat kelurahan tersebut, faktor pertama adalah pendidikan masyarakat yang rata-rata rendah yang mempengaruhi masyarakat susah mendapatkan pekerjaan tetap. Faktor kedua adalah bahwa terdapatnya beberapa kelompok pemuda yang sering mabuk sehingga dalam keadaan mabuk mereka mudah terpancing untuk berkelahi sehingga menimbulkan rasa marah dan dendam dihati masyarakat. Faktor ketiga adalah adanya kecemburuan sosial dari masyarakat Lambara terhadap masyarakat Baiya dikarenakan beredarnya isu pembuatan wilayah ekonomi khusus hanya untuk kawasan Baiya, sehingga dalam pikiran orang Lambara, masyarakat Baiya akan mendapatkan keuntungan besar dari program tersebut. Sedangkan bagi Masyarakat Baiya, jika mereka mendapat proyek besar dari hasil menjual tanah mereka, besar harapan akan mudah mendapatkan pekerjaan karena selama ini mereka tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

Faktor terakhir yang menyebabkan konflik terus berlangsung adalah faktor

penegakkan hukum dan kesadaran hukum dari masyarakat yang lemah. Selama ini setiap masyarakat yang tertangkap tawuran selalu dilepas oleh aparat penegak hukum. Hal itu mempengaruhi masyarakat tidak memiliki rasa jera atau takut akan melanggar hukum yang tertulis. Hal semacam itulah yang telah berlangsung di Kelurahan Lambara, sehingga susah dikendalikan.

Faktor-faktor yang dikemukakan oleh Yusaputra di atas sedikit berbeda dengan penuturan dari Fisher et.al, yang menyebutkan beberapa penyebab konflik menjadi kekerasan adalah karena konflik itu ditekan. Saat konflik ditekan maka masalah lainnya akan muncul sehingga konflik mengarah pada kekerasan. Faktor penyebab seperti kecemburuan sosial karena merasa dibedakan mungkin bisa dikatakan sebagai faktor penyebab mengapa konflik berubah menjadi kekerasan. Fisher juga menambahkan akibat tekanan pada konflik maka kekerasan adalah salah satu hal yang sangat mungkin terjadi terlebih tidak adanya wadah atau saluran dialog untuk mengungkap perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dengan memfasilitasi komunikasi diantara keduanya akan jauh lebih berguna untuk meredam konflik. Namun yang menjadi tanda tanya apakah faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan budaya mabuk anak muda Lambara bisa dikatakan sebagai faktor penyebab konflik, atau ada indikator-indikator lain yang tidak hanya menyebabkan masyarakat berkonflik, sebagaimana Fisher et.al, membahasnya dalam 6 teori yang bisa menjadi penyebab timbulnya konflik. Atau apakah cukup hanya sampai pada analisa bahwa konflik memang ada dan telah dilakukan upaya penyelesaiannya.

Menurut Thung Ju Lan (2010) dalam Jurnal Antropologi Indonesia UI pada

sub bab yang diberi judul Teori dan Praktek dalam Studi Konflik di Indonesia, ia menitikberatkan fokus pandangan pada cara bagaimana konflik itu dipelajari bukan hanya tentang dimana konflik itu terjadi dan apa bentuknya sehingga hanya terfokus sampai disitu. Menurutnya, hal itu penting di dalam karena dalam penelitian konflik selama ini banyak persoalan yang terkait dengan metodologi penelitian yang tidak pernah dibicarakan sehingga kelemahan dan kekuatan suatu pendekatan tidak pernah menjadi masukan bagi perbaikan penelitian konflik berikutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Hobbes (1962) mengemukakan bahwa manusia hidup untuk memenuhi hasrat mereka tentang kebahagiaan. Masalahnya, kebahagiaan dalam kehidupan alamiah manusia sulit untuk dicapai jika tidak ada sebuah institusi yang disebut sebagai pemerintah. Dalam kondisi absennya pemerintah maka yang terjadi adalah sebuah kompetisi. Kemudian Hobbes mencontohkan apabila dua orang berhasrat akan hal yang sama, dan hanya salah satu yang dapat memperoleh, mereka berdua menjadi bermusuhan. Hasrat mereka bergerak satu melawan yang lain. Kompetisi untuk memperebutkan hak yang langka dijustifikasi oleh hak untuk mempertahankan diri sendiri--suatu hak yang setiap orang telah dikaruniai oleh alam.

Manusia dalam alam itu memiliki hak yang sama terhadap semuanya. Artinya bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain juga berhak dimiliki oleh orang lainnya. Hak alamiah seperti inilah yang dapat memicu timbulnya persaingan dan kompetisi yang jika tidak dibatasi dengan sebuah kesepakatan atas

hak masing-masing akan menimbulkan peperangan. Hobbes (1962) mengemukakan ada 3 hukum alam, yaitu : pertama dan yang terpenting adalah mengikat manusia untuk mencari perdamaian. Kedua, memerintahkan mereka untuk menemukan jalan bagaimana mencapainya. Ketiga, apa yang disebut Hobbes sebagai keadilan, menuntut manusia untuk mematuhi kesepakatan. Tidak semua orang dapat memenuhi janjinya. Dengan kata lain tentu potensi terhadap terjadinya peperangan menjadi besar.

Untuk itu diperlukan lembaga atau pihak yang ditunjuk dan diberi kuasa untuk mengelola sebuah peraturan mengenai kesepakatan bersama tersebut. Dalam hal ini yang memiliki kuasa tersebut adalah penguasa atau negara. Ia juga mengatakan bahwa kekuasaan itu adalah negara, yang menjelma melalui kontrak, sesuai dengan itu, setiap orang memasuki suatu kontrak dengan orang lain untuk mengalihkan hak-hak yang diacu bagi hukum alam yang kedua baik kepada monarki maupun kepada majelis yang berdaulat (Saifuddin. 2005: 344-355).

Jika sebuah negara gagal menjaga kesepakatan atas hak masing-masing orang dan yang terjadi adalah peperangan, maka diperlukan sebuah upaya yang akan menjadi solusi bagi kondisi tersebut. Negara bersama masyarakat harus berupaya untuk menanganinya bersama karena pada hakikatnya sumber dari konflik tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Maka Fisher et.al, menawarkan solusi dari permasalahan tersebut dengan sebuah pendekatan untuk menangani konflik. Pendekatan yang dimaksud adalah resolusi konflik. Tujuan dari pendekatan resolusi konflik ini adalah kemampuan untuk mengelola konflik.

Fisher et, al juga mengatakan bahwa salah satu faktor penyebab konflik adalah dari hubungan masyarakat itu sendiri. Lalu mereka mengklasifikasikannya dengan teori hubungan masyarakat dimana teori ini menitikberatkan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, rasa ketidakpercayaan dan permusuhan. Seharusnya atas dasar ini konflik bisa diatasi dengan maksimal karena yang terjadi diantara masyarakat adalah masalah hubungan mereka satu sama lain. Namun, pada kenyataannya tak ada pihak yang menyadari atau melihat hubungan masyarakat secara khusus sebagai pokok permasalahan.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini mencari bagaimana cara penyelesaian konflik yang digunakan atau dipakai oleh masyarakat Muaro Pingai dan Saniang Baka. Dengan penelitian kualitatif, diharapkan akan membantu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011: 6).

Sedangkan tipe penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terperinci dari suatu gejala sosial tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Singarimbun, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif dapat menggambarkan secermat mungkin dan seluas-luasnya. Fenomena sosial diamati untuk mengembangkan konsep dan fakta, tapi tidak

untuk melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun, 1989 : 4). Sejalan dengan pemikiran Koentjaraningrat yang mengatakan bahwa penelitian dengan desain deskriptif merupakan penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi (Koentjaraningrat, 1993:89).

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka pada penelitian ini pendekatan deskriptif akan digunakan untuk mencari data seluas-luasnya dalam rangka memahami kondisi sosial dari kedua kelompok yang berkonflik, selain itu penelitian deskriptif ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk mendapatkan hasil yang baik, sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Solok, tepatnya di *nagari* Muaro Pingai Kecamatan Junjung Sirih dan Saniang Baka Kecamatan X Koto Singkarak. Kedua *nagari* ini terletak di tepi Danau Singkarak antara Sumani dan Paninggahan.

3. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemilihan informan jenis *purposive sampling*. Teknik ini bermaksud untuk memilih informan yang sesuai dengan tujuan kebutuhan penelitian. Informan yang dipilih ditentukan sendiri oleh keputusan peneliti dengan memiliki kriterianya tersendiri. Dalam hal ini, beberpa informan yang peneliti pilih dan wawancarai adalah :

Tabel 1

Tabel Nama Informan Penelitian

NO	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Warga nagari	Pekerjaan/Jabatan di nagari
1.	Amwa Dt. Mudo Nan Kuniang	Laki – laki	Saniang Baka	Ketua KAN Saniang Baka
2.	Rusdini (RD)	Perempuan	Muaro Pingai	Bundo Kandung Muaro Pingai
3.	Rusmadi (RM)	Laki-laki	Saniang Baka	Ex Sekna dan notulis saat beberapa kali mediasi dilakukan
4.	Kamius (KM)	Laki – laki	Muaro Pingai	Petani dan saksi perkelahian pada 2008
5.	Armansyah Gindo Alam (AR)	Laki – laki	Saniang Baka	Ketua Jorong Aia Angek dan saksi perkelahian pada 2008
6.	Man	Laki – laki	Muaro Pingai	Montir dan Korban perkelahian di 2008
7.	Nusa Jaya S. (NJ)	Laki – laki	Saniang Baka	Anggoa KAN
8.	Dirri Puherman (DR)	Laki – laki	Muaro Pingai	Saksi perkelahian pada 2008
9.	Ridwan Husen	Laki – laki	Saniang Baka	Wali nagari saat ini (2016)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

- a) Data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh melalui observasi/pengamatan langsung di lapangan dan wawancara mendalam yang telah disusun berdasarkan kepentingan penelitian.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari olahan bacaan beberapa referensi seperti dokumen tentang korban konflik, surat-surat kesepakatan, jurnal serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat menjadi referensi dalam penelitian.

4. Analisis Data

Analisa studi ini secara garis besar dibagi dalam lima bab. Bab I berupa pendahuluan. Uraian deskriptif tentang geografis lokasi penelitian disajikan dalam Bab II. Dalam Bab III, menerangkan beberapa garis besar tentang konflik, seperti tanah yang dijadikan objek konflik, tahapan-tahapan konflik dan bentuk penyelesaiannya Bab IV, dalam uraian ini lebih ditekankan pada analisis berdasarkan alat bantu yang digunakan oleh Fisher et.al, dimana dia mengemukakan ada 9 alat bantu analisis konflik. Disini penulis memilih satu dari sembilan alat bantu tersebut. Lalu di bab ini, penulis juga menganalisa cara pandang masyarakat mengenai upaya penyelesaian konflik sekaligus juga mengetahui faktor yang menjadi penyebab konflik tidak pernah selesai sampai sekarang berpijak dari pandangan masyarakat tersebut. Bab V yang merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari tulisan ini.

H. Jalannya Penelitian

Pada garis besarnya, penelitian ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, merupakan survei pendahuluan selama seminggu. Kemudian disusul tahap kedua, yang dilakukan antara bulan november 2016 sampai Februari 2017. Tahap kedua di dalamnya termasuk tahap pendalaman masalah kedua masyarakat *nagari* Saniang Baka dan Muaro Pingai. Pada tahap kedua ini, penulis tidak secara

terus menerus berada di lapangan. Hal ini disebabkan terjadinya aksi masa masyarakat Saniang Baka menutup akses jalan ke *nagarinya*. Menurut pengamatan dan wawancara penulis dengan salah satu masyarakat Saniang Baka, aksi tersebut dilakukan karena masyarakat menuntut pihak tambang untuk tidak mengoperasikan truknya di jalan Saniang Baka karena telah menyebabkan kerusakan jalan yang parah.

Dalam proses beberapa bulan ini, penulis juga memanfaatkan waktu untuk menelfon responden menanyai keberadaannya. Lanjut, penulis juga melakukan beberapa sesi wawancara yang cukup intensif. Mengingat lokasi penelitian ini berada di dua tempat yang berbeda, penulis menyiasatinya dengan menyelesaikan penelitian di satu tempat dulu, baru kemudian pindah ke tempat kedua sampai data yang diperoleh cukup. Di waktu lain, untuk melengkapi data yang masih minim namun penting, penulis bisa menghubungi responden yang terkait untuk menanya lebih jauh. Pada waktu tertentu penulis juga menemui beberapa instansi pemerintah seperti : Sekretaris *nagari* (Sekna), Wali *nagari*, Pihak Kecamatan Junjung Sirih dan X Koto Singkarak. Lalu beberapa tokoh *nagari* seperti : Ketua KAN, Sekretaris KAN, Bundo Kandung, dan pemuda. Hal tersebut dilakukan guna mencatat dan mencari data yang ada hubungannya dengan permasalahan. Beberapa peristiwa selain di peroleh dari wawancara yang direkam menggunakan handphone, penulis juga mengambil foto dengan menggunakan camera digital.

Data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat ada kalanya sepanjang hari dari pagi hingga sore hanya mendapatkan dua responden saja. Bahkan seringkali penulis hanya mampu

mewawancarai seorang responden dalam sehari. Rata-rata para responden setiap harinya disibukkan oleh pekerjaan di ladang dan di kantor pemerintahan. Kebanyakan waktu senggang mereka selepas jam 16.00 dan karena itu tidak jarang wawancara penulis lakukan sampai malam hari. Apabila wawancara ini sampai larut malam, penulis akan pulang ke rumah dahulu dan melanjutkannya besok sore lagi.

Selain itu, beberapa pengalaman lainnya yang terjadi di lapangan adalah kesusahan penulis dalam memperoleh jawaban yang relevan dengan pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan. Hal ini disebabkan karena aksi demo yang dilakukan masyarakat Saniang Baka berpengaruh pada hari pertama penelitian ini. Contohnya, beberapa pemerintahan *nagari* dan kecamatan tidak bisa ditemui di kantornya karena berada di tempat demo berlangsung. Hasilnya penulis melanjutkan penelitian 3 hari setelahnya, setelah aksi massa mereda.

Adakalanya apabila wawancara tiba pada suatu pertanyaan yang cukup sensitif yaitu mengenai hubungan dengan masyarakat *nagari* sebelah (tetangga), seperti hubungannya setelah konflik terjadi, mengenai batas wilayah *nagarinya*, mengenai perspektif mereka terhadap hubungan dengan masyarakat yang berkonflik dengan mereka dan lain sebagainya. Demikian pula pada pertanyaan yang berhubungan kebijaksanaan pemerintah mengenai masalah mereka. Keadaan semacam itu, tentunya didasarkan atas beberapa alasan yang cukup masuk akal. Pertama, peneliti takut masyarakat akan kembali memanas karena mengira bahwa peneliti adalah provokator yang ingin mengorek informasi untuk kepentingan yang buruk. Kedua, peneliti merasa canggung karena sebelumnya tidak pernah

ada bekal bagaimana cara bertanya yang baik (tidak menyinggung) orang yang pernah berkonflik dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari peneliti lebih cenderung menghindari konflik dengan orang lain. Oleh karena itu, setiap kali diadakan wawancara penulis berusaha memancing dengan pertanyaan sederhana dulu yang menarik perhatian informan, baru disela-sela informan dan penulis berbicara, penulis selipkan pertanyaan semacam itu. Walaupun seringkali pembicaraan lari dari tema pertanyaan penelitian, tapi penulis merasa lebih nyaman apabila wawancara dalam keadaan seperti itu. Beberapa informan juga ada orang yang berpendidikan dan mengerti kebutuhan penulis sebagai peneliti sehingga penulis juga merasa terbantu dengan jawabannya.

Kemudian peranan yang diberikan oleh rekan penulis yang menjabat sebagai asisten lapangan di sini juga telah banyak membantu penulis. Bagian penulis merasa paling terbantu adalah karena ia tinggal dekat dengan kedua lokasi penelitian ini. Jadi banyak atau sedikit dia juga mengenal beberapa informan penulis sehingga memberi kesempatan penulis bisa mengenal watak dari informan. Hal yang juga sangat penting adalah keterbatasan penulis dalam mengenali banyak bahasa juga dibantu oleh rekan yang mengerti bahasa masyarakat setempat.